

SEMINAR EDUKASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENTANG POLA PERILAKU DISIPLIN PRAJURIT DALAM PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Suci Rahayu Ariadi, Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
sucirahayuariadi@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

Guiding and supervising the disciplinary behavior patterns of soldiers in military courts is an issue that has an important role in the context of national security. High discipline and orderly behavior are very important factors in maintaining the effectiveness and professionalism or quality of military members. What's more, until now soldiers still commit disciplinary violations which are a pattern of bad behavior, because the Military court itself upholds discipline. Discipline violation are contained in law (UU) 25 of 2014. The first problem is what are the factors that cause a soldier to commit a disciplinary violation? And secondly, how efforts can be made to overcome disciplinary violation? Therefore, the of community service article aims to provide a better understanding of the efforts made in fostering and supervising the disciplinary behavior patterns of soldiers in military courts.

Keywords: military court, pattern of behavior, discipline.

Abstrak

Pembinaan dan pengawasan pola perilaku disiplin prajurit dalam Pengadilan Militer merupakan isu yang memiliki peran penting dalam konteks keamanan nasional. Kedisiplinan yang tinggi dan perilaku yang tertib merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga efektivitas dan profesionalisme atau kualitas anggota militer. Terlebih lagi sampai pada saat ini masih saja prajurit melakukan pelanggaran disiplin yang merupakan pola perilaku yang tidak baik, dikarenakan Pengadilan Militer sendiri menjunjung kedisiplinan. Pelanggaran disiplin dimuat dalam Undang-undang (UU) 25 Tahun 2014. Menjadi permasalahan pertama apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang prajurit melakukan pelanggaran disiplin? Dan kedua bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menagatasi pelanggaran disiplin? Dan yang ketiga Oleh karena itu, tulisan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan pola perilaku disiplin prajurit di pengadilan militer.

Kata kunci: pengadilan militer, pola perilaku, disiplin..

PENDAHULUAN

Pengadilan Militer (PM) memainkan peran penting dalam menjaga disiplin, ketertiban, dan keadilan di lingkungan militer. Peradilan Militer (PM) memberikan tuntutan dan kewajiban yang tinggi kepada prajurit untuk melakukan peradilan secara jujur, profesional, dan

adil. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian pola tingkah laku prajurit dalam darurat militer sangatlah pentingnya. Contohnya seperti Prajurit sering kali melakukan pelanggaran seperti pelanggaran disiplin.

Pola perilaku prajurit dalam Pengadilan Militer (PM) mencakup berbagai aspek, termasuk tingkah

laku/sikap, etika, komunikasi, integritas, dan penegakan hukum yang adil. Pola perilaku yang baik dan profesional sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan baik dan lancar, martabat militer ditegakkan dan kepercayaan publik diperoleh.

Pembinaan dan pengawasan merupakan dua bagian yang saling terkait satu sama lain dan juga saling melengkapi dalam upaya memperbaiki dan menjaga pola perilaku prajurit dalam pengadilan militer. Pembinaan melibatkan pendekatan proaktif, yang dimana dimulai dari diri sendiri dahulu daripada menuntut orang lain untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan prajurit melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan yang tepat. Pembinaan sendiri bertujuan untuk membentuk prajurit yang memiliki pola perilaku yang sesuai dengan standar dan nilai-nilai militer.

Sementara itu, pengawasan sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mematuhi aturan, etika, dan prosedur pengadilan militer. Pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran, mengidentifikasi penyimpangan dan jika perlu menjatuhkan sanksi yang sesuai.

Pembinaan dan pengendalian tingkah laku prajurit di hadapan pengadilan militer mempunyai tujuan yang sama, yaitu profesionalisme, integritas dan kepercayaan terhadap pengadilan militer. Secara lebih luas, hal ini juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan militer serta memperkuat citra positif lembaga tersebut.

Berbicara mengenai militer kepada masyarakat, di Indonesia sendiri hukum militer belum sepenuhnya

mendapatkan perhatian penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diyakini karena dipengaruhi oleh keberadaan, dari pada penerapan hukum militer itu sendiri yang tidak transparansi dalam kehidupan.

masyarakat Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat yang masih sempit bahwa hukum militer hanya diberlakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hanya untuk orang-orang seperti militer saja. Jadi, masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan yang seharusnya masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh aturan hukum juga harus memberikan perhatian.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) oleh Fakultas Hukum pada bulan Juni tahun 2023 dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar memberikan sebuah Seminar edukasi mengenai pentingnya pembinaan dan pengawasan tentang pola perilaku prajurit kepada masyarakat agar memberikan pemahaman dan pembinaan terkait pola perilaku prajurit dalam Pengadilan Militer (PM).



Gambar 1.1 pada saat memberikan sosialisasi tentang pola perilaku disiplin prajurit di PM.

HASIL

Dalam kehidupan sosial,

manusia memiliki pola perilakunya masing-masing. Terutama dalam pola perilaku seorang prajurit dalam Pengadilan Militer (PM).

Militer sendiri memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu, perkumpulan yang teratur, mengenakan pakain yang seragam, harus menerapkan disiplin yang tinggi dan ketaatan pada hukum perang. Jika ciri-ciri tersebut tidak dilaksanakan, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai "Prajurit" melainkan lebih tepatnya dengan "kelompok bersenjata". Jadi, penegakan disiplin sangat perlu ditegakkan dan dijalankan oleh setiap anggotanya, para perwira satuan tanpa adanya sikap perilaku disiplin maka satuan itu hanya disebut sebagai gerombolan bersenjata yang berbahaya baik masyarakat maupun Negara. Oleh sebab itu, sapta marga dan sumpah prajurit dengan tegas menekankan sebetulnya prajurit wajib tunduk dan patuh kepada atasannya tanpa mengeluh atau keberatan. Mengerjakan tugas harus dengan ikhlas



Gambar 1.2 foto bersama dengan prajurit-prajurit TNI

Senang dan rasa tanggung jawab penuh terhadap kewajiban yang dipercayakan

Seorang prajurit Militer merupakan seseorang yang bersenjata dari suatu negara yang disiapkan khusus untuk menjaga keamanan Negara. Yang dimana merupakan orang yang terdidik dan terlatih untuk menghadapi sebuah

peperangan, maka dari itu seorang prajurit harus selalu

menjunjung tinggi sikap perilaku disiplin yang mana telah diatur dalam Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Perilaku disiplin harus selalu ditegakkan dan merupakan salah satu syarat mutlak bagi prajurit dimana disiplin menepati semua peraturann dan semua perintah dinas mengenai hal-hal kecil dengan tertib. Disiplin juga dilihat dari kerapihan dan kebersihan dalam berpakaian serta perlengkapan, rasa hormat kepada atasan dalam melakukan sebuah tugas. Didalam lingkungan Tentara Nasionall Indonesia (TNI) penghormatan itu sangat penting adanya agar terwujudnya disiplin karena dari penghormatanlah terlihat karakter setiap prajurit.

Namun, sampai pada saat ini pelanggaran prajurit masih sering terjadi seperti pelanggaran disiplin. Kecendrungan pelanggaran disiplin sendiri memiliki 2 faktor yaitu, faktor internal dan eksternal :

Faktor internal , yaitu fakto dari diri sendiri seorang prajurit seperti kondisi fisik dan psikologis :

- a. Pribadi , salah satu hal yang mempengaruhi kecendrungan perilaku pelanggaran disiplin
- b. Masalah kepercayaan dan ketaqwaan merupakan masalah penting yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan prajurit didalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pengetahuan terhadap hukum, dalam beberapa kejadian, bahwa TNI sebagai warga negara kelas 1 yang memiliki keistimewaan sehingga mengangga remeh kekuasaan hukum yang

diwakili kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

dapat menjadi faktor penguat yang positif.

Faktor Eksternal, merupakan faktor lingkungan diluar diri sendiri seorang prajurit, yaitu :

- a. Peran Kepemimpinan, kualitas kepemimpinan yang baik sangat penting dalam membentuk disiplin prajurit. Gaya kepemimpinan, komunikasi efektif, dan keteladanan dari para atasan dapat memberikan motivasi prajurit untuk mematuhi aturan dan tata tertib militer.
- b. Lingkungan Kerja, lingkungan fisik dan sosial yang dinamis juga dapat mempengaruhi disiplin kerja. Lingkungan yang tertib, aman, dan memungkinkan prajurit untuk berkonsentrasi pada tugas mereka dan mengurangi stress.
- c. kewajiban tugas, setiap diri sendiri memiliki kemampuan dan batas kemampuannya masing-masing baik secara fisik dan psikologis. kewajiban tugas yang melebihi kemampuan dapat merusak mental seseorang yang dapat membuat timbulnya tingkat stres dan dapat menimbulkan pelanggaran atau desersi.
- d. Faktor Keluarga, konflik keluarga, ketidakstabilan rumah tangga, atau masalah personal.
- e. Dukungan dan respons masyarakat, tanggapan dan dukungan positif dari masyarakat terhadap peran dan kontribusi militer. Memberikan penghargaan dan apresiasi masyarakat

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perilaku pelanggaran untuk mengurangi tingkat pelanggaran anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. kepemimpinan yang berhasil, manajemen yang berhasil mengurangi adanya tingkat pelanggaran di satuan. Ada empat unsur dalam kepemimpinan yaitu, unsur manusia yang memimpin, unsur manusia yang dipimpin, unsur sarana untuk memimpin dan unsur tujuan kepemimpinan. Dalam perspektif militer, tujuan kepemimpinan ialah mewujudkan satuan yang memiliki daya yang efektif yaitu satuan yang diorganisasi, diperlengkapi, dan dilatih untuk menyelesaikan misi.
- b. Pengetahuan tentang hukum, memberikan pengetahuan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Dengan pengetahuan yang memadai, anggota tni akan lebih mampu menghindari pelanggaran disiplin yang tidak disengaja.
- c. Penegakan Hukum yang tegas, memastikan adanya mekanisme yang efektif dan transparan dalam menangani pelanggaran disiplin. Proses pengadilan militer harus

dilaksanakan secara adil, cepat, dan konsisten terhadap semua anggota tni yang melanggar aturan. Ini akan menciptakan sanksi yang sesuai untuk melawan pelanggaran.

- d. Peningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota TNI dapat mengurangi potensi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran disiplin, seperti frustrasi, ketidakpuasan, dan ketagihan. Dukungan yang baik terhadap kebutuhan dasar dan pembinaan karir yang baik dapat memberikan motivasi dan kepuasan yang positif kepada anggota Tni.
- e. Keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan perilaku anggota tni. Masyarakat dapat memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain faktor dan upaya yang harus dilakukan. Selanjutnya ialah adanya evaluasi dan perbaikan, yang dimana evaluasi secara rutin terhadap mekanisme pengawasan yang ada, termasuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Diantaranya adalah berikut :

- a. Evaluasi kinerja Petugas Pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pengawas, baik secara individu maupun tim.

Evaluasi ini dapat melibatkan penilaian terhadap kepatuhan mereka terhadap prosedur atau tata cara pengawasan, kualitas laporan yang dihasilkan, dan responsivitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

- b. Identifikasi kelemahan dan tantangan, melalui analisis atau mengamati dari evaluasi kinerja, kelemahan dan tantangan yang ada dalam mekanisme pengawasan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Faktor seperti kurangnya sumber daya dan kurangnya pelatihan
- c. Pemantauan dan evaluasi lanjutan, setelah perbaikan diimplementasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi lanjutan untuk menilai keefektifan langkah-langkah yang diambil. Mengumpulkan data Pasca perbaikan, membandingkan dengan data sebelumnya, dan mengukur perubahan dalam tingkat pelanggaran disiplin dapat membantu mengevaluasi keberhasilan perbaikan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Uraian pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama ialah mengenai pengadilan militer (PM) yang dimana para prajuritnya memegang teguh kedisiplinan, ketertiban, dan keadilan. Namun masih ada saja prajurit yang melanggar kedisiplinan tersebut. Jadi, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pola perilaku para prajurit agar tidak ada lagi yang melanggar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya pola perilaku pelanggaran baik internal maupun eksternal, dan juga dilakukanlah upaya-upaya untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut dan juga sangat perlu adanya evaluasi dan pengawasan lebih secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta 2006.
- Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia . CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.

Peraturan Peundang-undangan

- UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.